



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor ..);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2016 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri dari :

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.323.996.003.920,50
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(112.861.447.860,74)</u>
c. Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.211.134.556.059,76

2. Belanja:

a. Semula	Rp. 1.270.288.541.571,62
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(96.072.243.982,41)</u>
c. Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.174.216.297.589,21
d. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 36.918.258.470,55

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>15.086.622.244,69</u>
3. Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 15.086.622.244,69

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 53.707.462.348,88
2. Bertambah/Berkurang	Rp. <u>(1.702.581.633,64)</u>
3. Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 52.004.880.715,24

Pasal 4

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

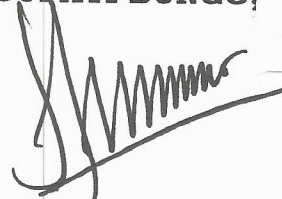
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

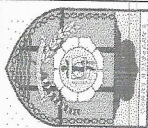
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 24.



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran I
Penjab
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.323.996.003.920,50	1.211.134.556.059,76	(112.861.447.860,74)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.736.601.277,50	123.883.203.009,90	5.146.601,7
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	24.873.911.800,00	25.678.611.800,00	804.700,0
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.147.776.947,50	4.147.776.947,50	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.323.526.826,00	3.810.734.000,00	(512.792.826,00)
1.1.1.4		85.391.385.704,00	90.246.080.262,40	4.854.694,5
1.2	DANA PERIMBANGAN	971.929.601.372,00	897.651.719.423,62	(74.277.881.948,38)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.329.886.372,00	92.256.704.131,62	(135.073.182.240,38)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	102.964.690.000,00	163.759.990.292,00	60.795.300,2
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.329.801.271,00	189.599.633.626,24	(43.730.167.644,76)
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	53.404.880.715,24	53.404.880,7
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.151.300.271,00	49.807.802.911,00	656.502,6
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	184.178.501.000,00	86.386.950.000,00	(97.791.551.000,00)
2	BELANJA	1.270.288.541.571,62	1.174.216.297.589,21	(96.072.243.982,41)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	717.862.121.823,00	737.656.666.628,64	19.794.544,64
2.1.1	Belanja Pegawai	584.622.543.159,00	566.211.764.629,64	(18.410.778.529,36)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	383.043.982,00	383.043,98
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00	606.744.000,00	
2.1.4	Belanja Hibah	20.299.400.000,00	7.866.000.000,00	(12.433.400.000,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	5.335.750.000,00	5.335.750,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.893.800,00	1.146.362.000,00	104.468,20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	110.291.540.864,00	155.917.002.017,00	45.625.461,15
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	190.000.000,00	(810.000.000,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	552.426.419.748,62	436.559.630.960,57	(115.866.788.788,05)
2.2.1	Belanja Pegawai	117.044.623.500,00	103.807.064.298,04	(13.237.559.201,96)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.195.149.649,62	216.220.680.534,99	(47.974.469.114,63)

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Printed By Simba

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2.2.3	Belanja Modal	171.186.646.599,00	116.531.886.127,54	(54.654.760.4
		53.707.462.348,88	36.918.258.470,55	(16.789.203.8
3	SURPLUS / (DEFISIT)			
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	15.086.622.244,69	15.086.622.2
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya	0,00	15.086.622.244,69	15.086.622.2
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	53.707.462.348,88	52.004.880.715,24	(1.702.581.6
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	52.004.880.715,24	50.504.880,0
		52.207.462.348,88	0,00	(52.207.462.3
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)	(36.918.258.470,55)	16.789.203.8
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	

TELAH DITELAH SESUAI KE TUNTUAN

KAB. BUNGO

YUNI SE

NIP. 1970624.2.002.7002

H. ZION SE. ME

NIP. 19610608.1992.1.010

WABUNGO

H. MA

BUPATI

TELAH DITELAH SESUAI KE TUNTUAN

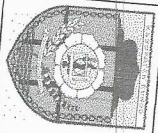
KASUBBAG PUU

HAMBALIT SH

NIP. 19760416.200212.1.005

RAHMAD HARIJADI SH

NIP. 19660910.199303.1.004



RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran Ia
No
Tari

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	5 = 4 - 3		
1	2	3	4			6	
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah						
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.323.996.003,920,50	1.211.134.556,059,76	(112.861.447.860,74)		(8,52)	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	118.736.601.277,50	123.883.203.009,90	5.146.601.732,40		4,33	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	24.873.911.800,00	25.678.611.800,00	804.700.000,00		3,24	
4.1.1.02	Pajak Restoran	851.201.800,00	1.180.000.000,00	328.798.200,00		38,63	
4.1.1.02.01	Restoran	600.000.000,00	820.000.000,00	220.000.000,00		36,67	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	251.201.800,00	360.000.000,00	108.798.200,00		43,31	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.436.000.000,00	1.475.000.000,00	39.000.000,00		2,72	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.03.05	Pameran	1.126.000.000,00	1.165.000.000,00	39.000.000,00		3,46	
4.1.1.03.07	Karaoke	429.310.000,00	450.000.000,00	20.690.000,00		4,82	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00		75,00	
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	0,00	900.000,00	900.000,00		0,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	163.000.000,00	146.810.000,00	(16.190.000,00)		(9,93)	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)		(30,00)	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	221.810.000,00	251.000.000,00	29.190.000,00		13,16	
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	16.000.000,00	20.500.000,00	4.500.000,00		28,13	
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.500.000,00	2.290.000,00	(210.000,00)		(8,40)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)		(14,29)	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.767.000.000,00	1.350.911.800,00	(416.088.200,00)		(23,55)	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.430.800.000,00	1.230.000.000,00	(200.800.000,00)		(14,03)	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	198.000.000,00	85.000.000,00	(113.000.000,00)		(57,07)	
4.1.1.04.11	Reklame Banner	1.200.000,00	2.750.000,00	1.550.000,00		129,17	
		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	
		47.000.000,00	15.661.800,00	(31.338.200,00)		(66,68)	
		87.500.000,00	15.000.000,00	(72.500.000,00)		(82,85)	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINGKASAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI

Printed By: admin

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	D
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4					
6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	1.500.000.000,00	52.004.880.715,24	50.504.880.715,24	3.366,99			
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	52.207.462.348,88	0,00	(52.207.462.348,88)	(100,00)			
6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga	52.207.462.348,88	0,00	(52.207.462.348,88)	(100,00)			
6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Pokok pada Pihak Ketiga	52.207.462.348,88	0,00	(52.207.462.348,88)	(100,00)			
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)	(36.918.258.470,55)	16.789.203.878,33	(31,26)			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00			


 KASUBBAG PPU
 NIP. 197804162002121005

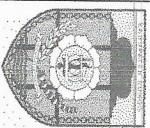

 RAHMAD HARIJADI
 NIP. 196509101993031004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
 KASUBBAG PPU
 HAMBALITSH
 NIP. 197804162002121005

KABAG HUKUM
 RAHMAD HARIJADI
 NIP. 196509101993031004

WAPUP BUNGO
 H. APRI, S.Pd

Muara Bungo,
 BUPATI BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran II

Penjab
Nomor
Tanggal

Urusan Pemerintahan : 2.03
Organisasi : 2.03.01
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6		
2.03.2.03.01.00.00.5	BELANJA	8.000.177.626,00	5.252.873.509,00	(2.747.304.117,00)	(34,34)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.942.895.996,00	2.711.626.729,00	(231.269.267,00)	(7,86)		
2.03.2.03.01.00.00	Non Kegiatan	2.942.895.996,00	2.711.626.729,00	(231.269.267,00)	(7,86)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.942.895.996,00	2.711.626.729,00	(231.269.267,00)	(7,86)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.178.638.996,00	2.029.871.729,00	(148.767.267,00)	(6,83)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Utang Representasi	1.582.161.633,00	1.460.944.800,00	(121.216.833,00)	(7,66)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.590.893,00	151.174.108,00	(14.416.785,00)	(8,71)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.150.000,00	213.150.000,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.836.645,00	34.440.000,00	(3.396.645,00)	(8,98)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Besar	87.223.854,00	80.168.940,00	(7.054.914,00)	(8,09)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.370.953,00	38.370.953,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.035.636,00	41.454.372,00	(1.581.264,00)	(3,67)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.997.358,00	4.508.082,00	(489.276,00)	(9,79)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	6.246.684,00	5.635.134,00	(611.550,00)	(9,79)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	764.257.000,00	681.755.000,00	(82.502.000,00)	(10,80)		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	764.257.000,00	681.755.000,00	(82.502.000,00)	(10,80)		
2.03.2.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.057.281.630,00	2.541.246.780,00	(2.516.034.850,00)	(49,75)		
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.680.100,00	783.058.800,00	(32.621.300,00)	(4,00)		
2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00		
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000,00	76.800.000,00	(14.400.000,00)	(15,79)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
2.03 . 2.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.850.000,00	27.685.000,00	(15.165.000,00)	(35,39)	
2.03 . 2.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	4.875.000,00	(6.975.000,00)	(58,86)	
2.03 . 2.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	22.810.000,00	(8.190.000,00)	(26,42)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.000.177.626,00)	(5.252.873.509,00)	2.747.304.117,00	(34,34)	

TELAH DITELEPON
 KASUBAG PUU
 NIP. 19760419.200212.1.005
 H. ZADIN, SE. MSi
 NIP. 19650910.199303.1.004

WABIR BUNGO
 H. APRIS, Pd

Muara Bungo,
 BUPATI

TELAH DITELEPON SESUAI KETENTUAN
 KASUBAG PUU
 HAMBALI, SH
 NIP. 19760419.200212.1.005
 RAHMAD HARIJADI, SH
 NIP. 19650910.199303.1.004

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
1		3	4	5
	Belanja Hibah		20,299,400,000.00	7,866,000,000.00
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		5,768,400,000.00	4,778,400,000.00
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		2,660,400,000.00	1,970,400,000.00
1	APKASI		15,000,000.00	25,000,000.00
	Asosiasi pemerintah kab. bungo seluruh Indonesia	Kabupaten Bungo	15,000,000.00	25,000,000.00
2	KONI		2,425,400,000.00	1,425,400,000.00
	Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kab. Bungo	Kabupaten Bungo	2,425,400,000.00	1,425,400,000.00
3	PRAMUKA		200,000,000.00	200,000,000.00
	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bungo	Kabupaten Bungo	200,000,000.00	200,000,000.00
4	KOMDA LANSIA		20,000,000.00	20,000,000.00
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	20,000,000.00	20,000,000.00
5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)		0.00	300,000,000.00
	Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	Kabupaten Bungo	0.00	300,000,000.00
6	Organisasi Kemasyarakatan		3,108,000,000.00	2,808,000,000.00
	Korpri		200,000,000.00	200,000,000.00
	Korps Pegawai Republik Indonesia Dewa Pengurus Cabang Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	200,000,000.00	200,000,000.00
7	Lembaga Adat		250,000,000.00	250,000,000.00
	Lembaga Adat	Kabupaten Bungo	250,000,000.00	250,000,000.00
8	PMI		150,000,000.00	150,000,000.00
	Palang merah Indonesia cabang bungo	Kabupaten Bungo	150,000,000.00	150,000,000.00
9	MUI		100,000,000.00	100,000,000.00
	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kabupaten Bungo	100,000,000.00	100,000,000.00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
15	Belanja Hibah Kepada BOP PAUD Masyarakat (Swasta Non Fisik) Kecamatan Tanah Tumbuh		0.00	160,200,
1	Kelompok Bermain Harapan Batang Uleh Dusun Tebing Tinggi Uleh	Dusun Tebing Tinggi Uleh	0.00	26,400
2	Kelompok Bermain Harapan Pagar Jaya Dusun Teluk Panjang	Dusun Teluk Panjang	0.00	22,200
3	Kelompok Bermain Buah Hati Jin. Lintas Sumatra	Jin. Lintas Sumatra	0.00	9,600
4	TK Dharmawarita Trh Ds Tanah Tumbuh	Ds Tanah Tumbuh	0.00	9,000
5	Kelompok Bermain Restu Bunda Dusun Baru Telentam	Dusun Baru Telentam	0.00	10,200
6	Kelompok Bermain Kemang Manis Jin. Dantapus Bukit Kemang	Jin. Dantapus Bukit Kemang	0.00	17,400
7	Kelompok Bermain Serai Serumpun Dusun Teluk Kecimbung	Dusun Teluk Kecimbung	0.00	18,000
8	Kelompok Bermain Harapan Jaya I Dusun Tanah Tumbuh	Dusun Tanah Tumbuh	0.00	8,400
9	Kelompok Bermain Pembinaan Dusun Renah	Dusun Renah	0.00	11,400
10	Kelompok Bermain Kojia Ceria Dusun Koto Jayo	Dusun Koto Jayo	0.00	18,600
11	Kelompok Bermain Harapan Bunda Dusun Tanjung Beringin	Dusun Tanjung Beringin	0.00	9,000
16	Belanja Hibah Kepada BOP PAUD Masyarakat (Swasta Non Fisik) Kecamatan Batin III		0.00	94,800,
1	TK Kasih Ibu Dusun Lubuk Benteng	Dusun Lubuk Benteng	0.00	12,000
2	TK Tunas Manggis Kelurahan Manggis	Kelurahan Manggis	0.00	11,400
3	Kelompok Bermain Raudatu Quran Sungai Binjai	Sungai Binjai	0.00	13,800
4	Kelompok Bermain Kasih Ibu BTN Roni Permai	BTN Roni Permai	0.00	10,200
5	PAUD Baitul Jannah Sungai Binjai	Sungai Binjai	0.00	13,800
6	TPA Permata Bunda Dusun Air Gemuruh	Dusun Air Gemuruh	0.00	6,000
7	Kelompok Bermain Harapan Bangsa BTN Roni Permai	BTN Roni Permai	0.00	7,200
8	Kelompok Bermain Mawar Dusun Air Gemuruh	Dusun Air Gemuruh	0.00	9,600
9	TK Perintis Purwo Bakti Jin. Tanah Tumbuh Kel. Bungo Taman Agung	Jin. Tanah Tumbuh Kel. Bungo Taman Agung	0.00	10,800

TELAH DITELITI OLEH	
KOROS GABAN	KATA PENGANTAR
	
NIP. 19750415 2002121 005	NIP. 19660910 199303 1 004

WABUP BUNGO
Muara Bungo,
14 APRIL 2024

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU	KABAG HUKUM
	
HAMBALLI, SH	RAHMAD HARIJADI, SH
NIP. 19750415 2002121 005	NIP. 19660910 199303 1 004

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
1	Belanja Bantuan Sosial		0.00	5,335,750.00
	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan		0.00	
1	Bantuan Sosial	Kabupaten Bungo	0.00	
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		0.00	5,335,750.00
	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake		0.00	4,791,750.00
1	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake Kec. Pasar Muara Bungo	Kec. Pasar Muara Bungo		
	SD Kurang Bayar TA.2015		0.00	114,000.00
	SMP Kurang Bayar TA.2015		0.00	131,000.00
	SMA Kurang Bayar TA.2015		0.00	99,000.00
	S1 Kurang Bayar TA.2015		0.00	81,000.00
2	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake Kec. Pelepat	Kec. Pelepat		
	SD Kurang Bayar TA.2015		0.00	130,500.00
	SMP Kurang Bayar TA.2015		0.00	67,000.00
	SMA Kurang Bayar TA.2015		0.00	16,500.00
	S1 Kurang Bayar TA.2015		0.00	9,000.00
3	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake Kec. Pelepat Ilir	Kec. Pelepat Ilir		
	SD Kurang Bayar TA.2015		0.00	156,000.00
	SMP Kurang Bayar TA.2015		0.00	84,000.00
	SMA Kurang Bayar TA.2015		0.00	75,000.00
4	Belanja Bantuan Beasiswa Program Samisake Kec. Rantau Pandan	Kec. Rantau Pandan		
	SD Kurang Bayar TA.2015		0.00	150,000.00
	SMP Kurang Bayar TA.2015		0.00	66,000.00
	SMA Kurang Bayar TA.2015		0.00	96,000.00
	S1 Kurang Bayar TA.2015		0.00	4,000.00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
15	Belanja Bantuan Sosial UMKM Program Samisake Kec. Bathin III Ulu Kurang Bayar Bantuan Sosial UMKM TA.2015	Kec. Bathin III Ulu	0.00	32,000,00
16	Belanja Bantuan Sosial UMKM Program Samisake Kec. Jujuhan Ilir Kurang Bayar Bantuan Sosial UMKM TA.2015	Kec. Jujuhan Ilir	0.00	32,000,00
17	Belanja Bantuan Sosial UMKM Program Samisake Kec. Bathin III Kurang Bayar Bantuan Sosial UMKM TA.2015	Kec. Bathin III	0.00	32,000,00

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KABUPATEN BUNGO

Kec. Bathin III Ulu

Kec. Jujuhan Ilir

Kec. Bathin III

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PUU

KABAG HUKUM

HAMELI SH

RAHMAD HARIJADI SH

NIP 197604 6 200312 1 005

NIP 19650910 199303 1 004

Muara Bungo,

WABUP BUNGO

H. APRIS.Pd

BPATI BUNGO

H. MASHURI

S EKIK